



Analisis Gender Model Longwe pada Program Industri Rumahan di Kota Pangkalpinang

Tiyas Nur Haryani, Raina Zadyanti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Sebelas Maret

Abstrak

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menunjukkan sebesar 9,59 persennya adalah penduduk laki-laki dan 10,06 persen adalah perempuan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan pada perempuan yaitu melalui program unggulan bernama Three Ends dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) sebagai leading sector. Salah satu aspek dari program ini yaitu mengakhiri kesenjangan ekonomi yang dimanifestasikan ke dalam Program Industri Rumahan (IR) yang bertujuan memberdayakan perempuan pelaku IR agar dapat mengembangkan usahanya. Kota Pangkalpinang sebagai salah satu pelaksana program IR dipilih dalam penelitian ini karena merupakan sentral perekonomian dan memiliki tingkat garis kemiskinan paling tinggi di Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat pemberdayaan pelaku IR di Kota Pangkalpinang melalui analisis model gender milik Longwe yang terdiri dari lima level capaian pemberdayaan yaitu 1) Kesejahteraan, 2) Aspek, 3) Penayadaran, 4) Partisipasi, dan 5) Kontrol. Jenis penelitian yang dilakukan adalah mixed method berupa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Responden dalam penelitian ini berjumlah 32 orang pelaku IR yang telah terjaring program dan informan yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi yang divalidasi dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program IR belum optimal dalam memenuhi beberapa level analisis longwe seperti akses, partisipasi, dan kontrol. Hanya level kesejahteraan dan penayadaran yang terpenuhi.

Kata kunci: Analisis Gender Longwe; Feminisasi Kemiskinan; Industri Rumahan; Pemberdayaan Perempuan

Coressponding author

Email: tiyasnurharyani@staff.uns.ac.id

Pendahuluan

Kemiskinan dapat menjadi masalah publik yang menimpa entitas penduduk laki-laki, perempuan, lansia, disabilitas dan anak-anak. Menurut laporan statistik (BPS, 2018) presentase penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan presentase sebesar 9,59% pada penduduk laki-laki, sedangkan perempuan sebesar 10,06% penduduk. Ukuran tersebut menandakan masih terjadi kesenjangan diantara laki-laki serta perempuan yang ditandai dengan jumlah penduduk miskin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kemiskinan pada perempuan akan semakin kompleks mana kala dihadapkan dengan persoalan lain, diantaranya pendidikan yang rendah serta kepemilikan dan kontrol yang rendah terhadap aset dibandingkan laki-laki, sehingga menyebabkan kemiskinan makin menekan keadaan mereka. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam datanya juga menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan yaitu 7,72 tahun dan angka tersebut lebih rendah satu tahun dari laki-laki dengan rata-rata sekitar 8,62 tahun (KPPA RI, 2019b, p. 40). Pada aspek ekonomi, perempuan memiliki sumbangan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang dibuktikan oleh data rasio Produk Nasional Bruto (PNB) antara perempuan dengan laki-laki di Indonesia sebesar 0,51 yang terpaut lebih rendah 0,06 poin dari rata-rata dunia dan belum dapat mencapai angka 1 (KPPPA RI, 2019b, p. 23). Angka tersebut menandakan bahwa masih terjadinya kesenjangan penghasilan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia (KPPPA RI, 2019b, p. 23). Aspek sosial-budaya juga melanggengkan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan. Budaya patriarki yang masih terinternalisasi dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya para perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA RI) berupaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada perempuan dengan sebuah strategi bernama *Three Ends*. Strategi ini memuat tiga prinsip, diantaranya: 1) *End Violence Against Women and Children* atau mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2) *End Human Trafficking* atau mengakhiri perdagangan manusia, dan 3) *End Barriers to Economic Justice* atau mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan (KPPPA RI, 2016). Salah satu poin dari strategi tersebut yaitu mengakhiri kesenjangan ekonomi terhadap perempuan yang diwujudkan dalam Program Industri Rumahan (IR). Program IR diinisiasikan sejak tahun 2016 dengan melibatkan 21 kabupaten/kota sebagai *pilot project* atau uji coba pelaksanaan dan berhasil menyentuh lebih dari 3000 perempuan pelaku IR (KPPPA RI, 2019a). Program ini berlangsung selama tiga tahun yakni 2016 hingga 2019 dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkannya. Program IR juga bertujuan untuk memberdayakan perempuan pelaku usaha agar mereka dapat mengembangkan usaha yang mereka jalani setelah mengikuti rangkaian kegiatan dari program ini.

Salah satu penyelenggara Program IR yaitu Kota Pangkalpinang yang merupakan ibu kota sekaligus pusat perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota Pangkalpinang juga menjadi pusat investasi minimarket yang tengah berkembang dan banyaknya gerai minimarket ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk memasarkan produknya (Ahada, 2020). Namun, terlepas statusnya sebagai ibukota dan pusat perekonomian di Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang juga belum dapat terlepas dari persoalan kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Data yang ada menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 9,76 ribu penduduk miskin di Kota Pangkalpinang (BPS, 2017, p. 13). Dilihat dari nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang memiliki angka sebesar 61,88 dan masih di bawah rata-rata nasional yaitu 75,24 (KPPPA RI, 2020, pp. 136, 214). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang selaku fasilitator program IR yang mulai diselenggarakan pada akhir 2018, turut serta dalam memberdayakan perempuan sebagai upaya mengurangi kemiskinan terutama pada perempuan. Sebanyak 32 orang perempuan pelaku IR yang terdaftar dalam program.

Fokus penelitian ini ditujukan di Kota Pangkalpinang dan peneliti melakukan analisis melalui perspektif gender terkait pencapaian upaya pemberdayaan Program IR pada perempuan di Kota Pangkalpinang melalui analisis Longwe. Analisis Longwe digunakan untuk mengukur pemberdayaan terhadap perempuan melalui lima tingkat pemberdayaan, di antaranya *welfare* (kesejahteraan), *access* (akses), *conscientisation* (penyadaran), *mobilisation* (mobilisasi), dan *control* (kontrol). Penelitian terdahulu yang ada banyak yang hanya berfokus pada kegiatan pemberdayaan bagi perempuan tanpa menggunakan analisis gender dan kajian dengan analisis gender pada program IR belum pernah diteliti sebelumnya, misalnya penelitian milik Kamaluddin (2018) yang membahas pemberdayaan perempuan pegiat industri rumahan di Kota Cirebon melalui program KPPPA RI. Kemudian, penelitian di Desa Tanjung Gunung yang dilakukan oleh Anggita et al., (2018) melalui bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan memberikan beberapa pendampingan melalui sosialisasi. Penelitian Mutiara (2017) juga menggunakan analisis gender Longwe untuk mengetahui responsivitas serta manfaat pemberdayaan dari kegiatan Sekolah Buruh Gendong. Unsur kebaruan pada penelitian ini yaitu penggunaan perspektif gender lewat analisis Longwe dalam menganalisis dampak Program IR pada perempuan. Analisis Longwe digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan perempuan di Kota Pangkalpinang yang mengikuti Program IR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemberdayaan pelaku IR di Kota Pangkalpinang yang mengikuti Program IR, yang diukur melalui analisis Longwe. Analisis Longwe terdiri dari lima tingkat pemberdayaan yang diurutkan dari yang rendah ke tinggi, yaitu paling rendah dimulai dari keberhasilan kesejahteraan, naik lagi ke tahapan akses, penyadaran, mobilisasi, hingga yang paling tinggi yaitu tahapan kontrol.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Pangkalpinang selama 3 bulan pada tahun 2021. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang dipakai terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan angket. Penelitian memiliki responden sebanyak 32 orang pelaku IR di 15 kelurahan dan empat di antaranya dijadikan sebagai narasumber untuk wawancara mendalam, di antaranya Pelaku IR 1 dari Kelurahan Rejosari, Pelaku IR 2 dari Kelurahan Lontong Pancur, Pelaku IR 3 dari Kelurahan Batin Tikal, dan Pelaku IR 4 dari Kelurahan Sriwijaya. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan bersama Petugas Sosial Masyarakat (PSM) Kecamatan Pangkal Balam selaku pihak yang memantau IR di kecamatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan (Kasi PP) DPPPAKB Kota Pangkalpinang selaku pihak yang menyelenggarakan Program IR. Jumlah narasumber sebanyak 6 orang ditentukan secara *purposive* dan berhenti saat terjadi kejenuhan pada data yang diperoleh di lapangan. *Purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018, p. 124). Data sekunder diperoleh dari dokumen kegiatan Program IR, adapun dokumen yang dimaksud yaitu dokumen seperti presensi hadir peserta pelatihan, buku panduan peserta pelatihan, dan data penerima bantuan KUR. Olah validitas data menggunakan triangulasi metode dan sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014, pp. 10–12).

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya mempersiapkan masyarakat serta memperkuat kelembagaan masyarakat, sehingga mampu menciptakan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) *Enabling*, yaitu menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, (2) *Empowering*, yaitu menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat, dan (3) *Protecting*, yaitu memberikan perlindungan terhadap masyarakat (Sumodiningrat, 1999, p. 14). Dari pemberdayaan salah satunya adalah untuk mengatasi feminisasi kemiskinan yang muncul dalam kehidupan yang beragam di masyarakat. Feminisasi kemiskinan menurut Medeiros dan Costa (2010, pp. 95–99) dapat didefinisikan sebagai dua hal, yaitu: peningkatan perbedaan dalam tingkat kemiskinan di antara perempuan dan laki-laki, dan peningkatan perbedaan dalam tingkat kemiskinan antara rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan di antara rumah tangga yang dikepalai oleh pria dan pasangan.

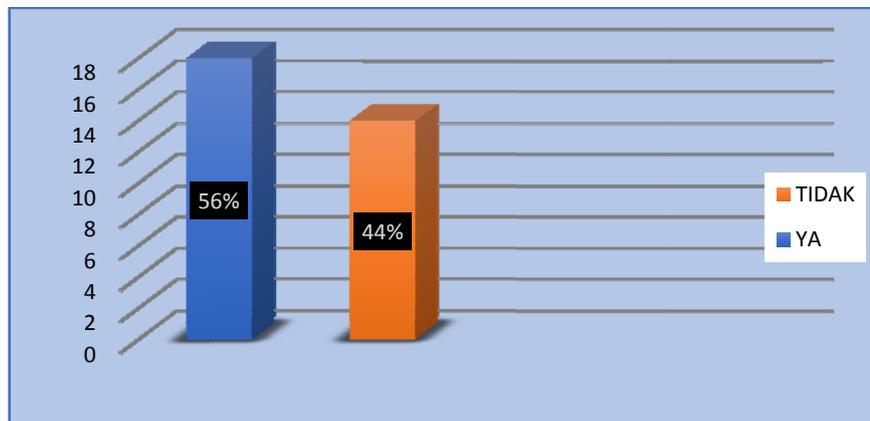
Dalam penelitian ini masalah feminisasi kemiskinan di Kota Pangkalpinang peneliti kaji dengan kajian berperspektif gender. Secara terminologis gender didefinisikan oleh

Rokhmansyah (2016, pp. 1–2) sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Realitanya gender banyak dipersepsikan sebagai jenis kelamin (sex), padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Beckman dan D'Amico (1994, pp. 3–4) mengonsepsikan bahwa gender padahal gender merupakan suatu sifat pada perempuan dan laki-laki yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Penelitian berperspektif gender menggunakan analisis gender. Kemajuan perempuan dibentuk dalam suatu proses pemberdayaan yang harus mengikutsertakan mereka ke dalam proses pengambilan keputusan sebagai wahana mereka dalam merubah praktik dan hukum yang mendiskriminasikan mereka, serta mencapai pembagian kerja yang adil berdasarkan gender dan alokasi sumber daya. Dalam analisis gender, Longwe mengklasifikasikan pemberdayaan perempuan ke dalam lima tingkat kerangka pemberdayaan perempuan. Kerangka ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pemberdayaan terhadap perempuan telah terwujud, dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu (a) kesejahteraan, lalu (b) akses, (c) penyadaran, (d) partisipasi, hingga yang paling tinggi (e) kontrol.

1. Kesejahteraan

Pada penelitian ini, peningkatan kesejahteraan dilihat dari intervensi Program IR terhadap peningkatan status ekonomi pelaku IR, baik itu dari kesejahteraan usaha maupun keluarga. Peningkatan kesejahteraan tersebut dilakukan melalui pemberian manfaat kepada pelaku IR lewat Dana KUR serta Pelatihan ICT. Pemberian bantuan dana KUR baru sampai penerimaan data oleh pihak bank dan konfirmasi lanjutan belum disampaikan ke pada pelaku IR sehingga upaya ini belum optimal karena dana belum diperoleh sepenuhnya oleh pelaku IR. Di sisi pelatihan ICT atau komputer dilakukan sebagai modal pengetahuan bagi pelaku IR untuk mengelola dan mengembangkan usaha mereka. Sebesar 56 persen pelaku IR menjawab perkembangan usaha yang mereka geluti dapat membantu dan meningkatkan perekonomian keluarga.

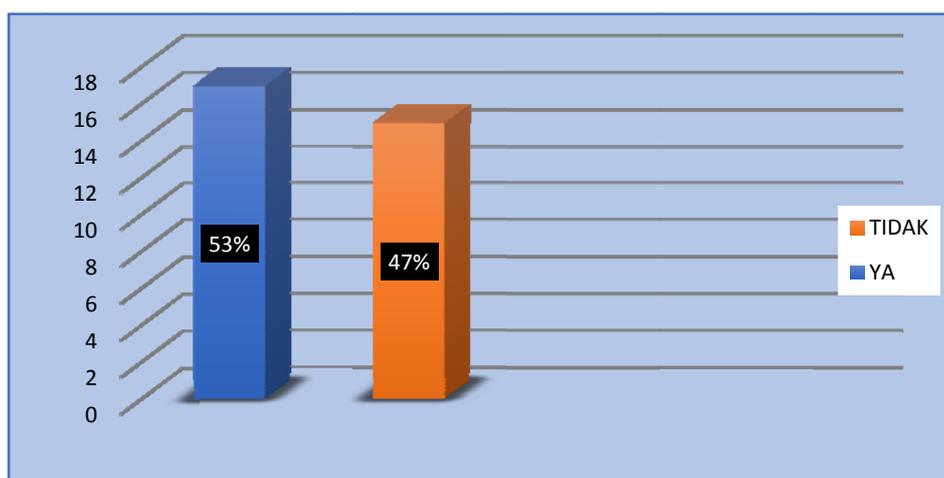
Gambar 1 Grafik Perkembangan Usaha Membantu dan Meningkatkan Perekonomian Keluarga Pelaku IR Kota Pangkalpinang



Sumber: Data diolah, 2021

Selain meningkatkan perekonomian keluarga, 53 persen pelaku IR menyatakan bahwa perkembangan usaha mereka berpengaruh dengan kemandirian keuangannya. Artinya lebih dari setengah pelaku IR merasakan bahwa perkembangan usaha setelah program dapat membantu perekonomian mereka melalui pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan. Ilmu yang mereka peroleh seperti pengaturan keuangan dan pembelian bahan baku menggunakan teknologi, membuat mereka dapat mengelola usahanya agar lebih efektif secara operasional dan hal tersebut sedikit berdampak bagi kesejahteraan keluarga.

Gambar 2 Grafik Perkembangan Usaha Membantu Keuangan Pelaku IR Kota Pangkalpinang lebih Mandiri



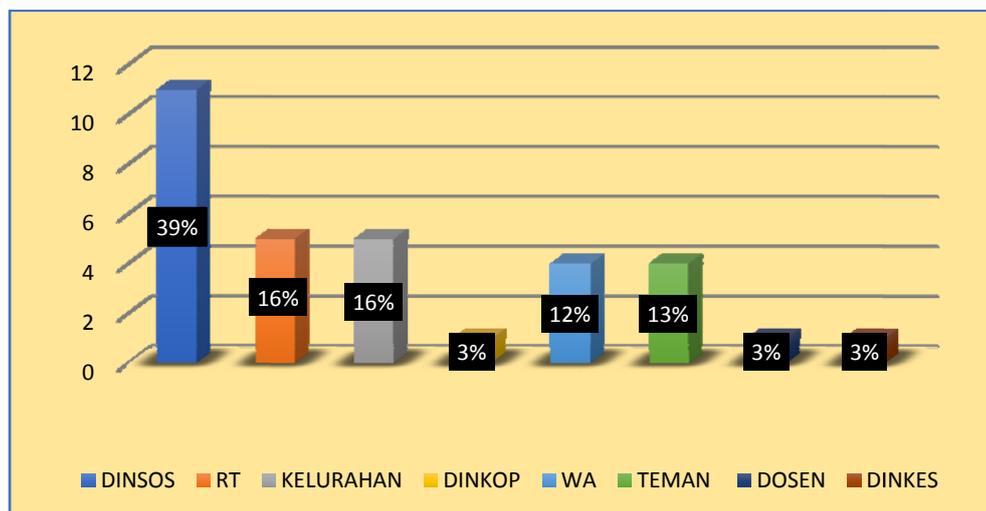
Sumber: Data diolah, 2021

Peningkatan juga terlihat dari kemampuan mereka, seperti yang awalnya hanya berjualan secara konvensional, namun setelah ikut pelatihan mereka dapat mempraktikkan berjualan secara *online* atau daring. Kontribusi pelatihan dapat dilihat dari manfaat pengetahuan yang dipraktikkan oleh pelaku IR terhadap usahanya, seperti halnya ilmu menggunakan teknologi komputer yang digunakan untuk mengelola operasional bisnis hingga memasarkan produk, sehingga sebagian besar para pelaku IR memperoleh pesanan lewat pemanfaatan teknologi tersebut.

2. Akses

Sebagian besar pelaku IR menjawab mereka memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi ke pelatihan yang diselenggarakan oleh Program IR. Mayoritas pelaku IR mendapatkan informasi mengenai pelatihan mereka dapatkan langsung dari Organisasi Perangkat Daerah atau (OPD) seperti Dinas Sosial yang dulunya satu kesatuan dengan Dinas Perempuan dan Kelurahan. Sumber informasi lainnya yaitu RT, kelurahan, grup *Whatsapp*, teman pemilik UMKM, dan Dosen ISB Atma Luhur Kota Pangkalpinang selaku pengisi materi dalam pelatihan. Pelaku IR mudah mengakses informasi pelatihan dengan langsung mendapatkan tawaran atau melalui media sosial yang membuka akses mereka dengan mudah untuk mengikuti kegiatan pelatihan.

Gambar 3 Grafik Sumber Informasi Pelaku IR Kota Pangkalpinang dalam Mengakses Pelatihan ICT dari Program IR

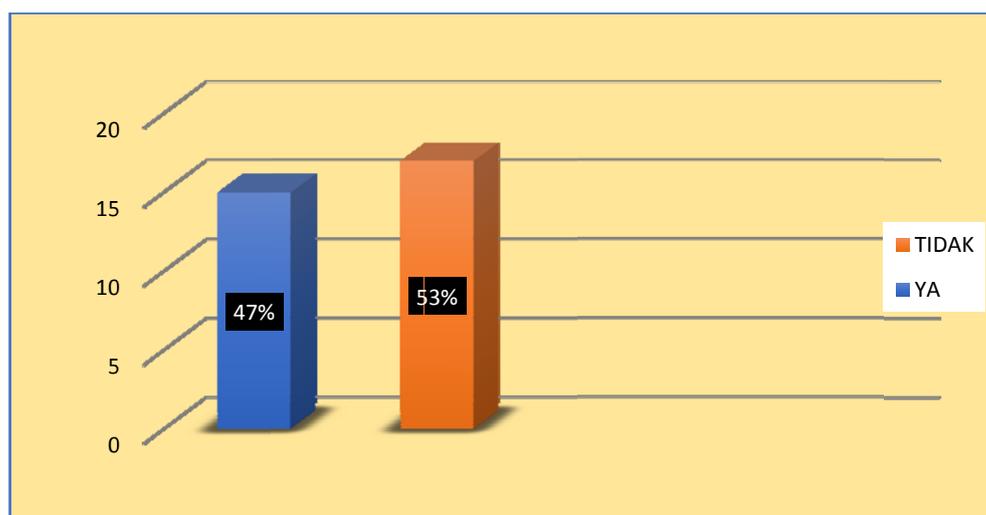


Sumber: Data diolah, 2021

Selanjutnya, pelaku IR yang aktif mengikuti kegiatan pelatihan juga selalu diikutsertakan ke dalam kegiatan lainnya seperti bazar atau pameran, baik yang diselenggarakan DP3AKB maupun instansi lainnya. Kasi PP menjelaskan bahwa

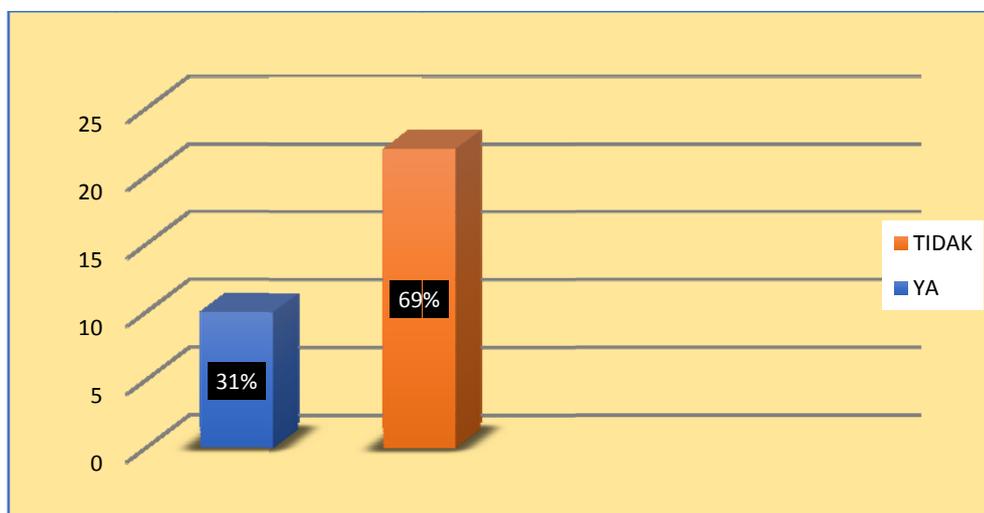
sebenarnya Program IR dapat diakses oleh semua kalangan perempuan, namun yang menjadi penghambat adalah mengakses perempuan yang belum memiliki usaha, khususnya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga karena masih bingung untuk memilih usaha yang ingin ditekuni. Program IR juga dilihat dari dorongannya bagi pelaku IR untuk menjangkau pasar dan konsumen yang lebih luas, namun hanya sebesar 46 persen pelaku IR yang memiliki akses ke pasar dan konsumen yang lebih luas. Program IR belum secara optimal membuka akses semua pelaku IR ke pasar dan konsumen yang lebih luas karena persoalan pemangkasan dana yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 juga menghambat hal tersebut. Para pelaku IR melakukan usahanya secara mandiri untuk menjangkau pasar dan konsumen yang lebih luas dengan mengisi pameran dari kota atau provinsi sebagai perwakilan dari kecamatannya masing-masing. Sebesar 53 persen pelaku IR juga belum memiliki akses ke kegiatan pelatihan maupun bantuan modal usaha dari instansi lain. Hanya beberapa pelaku IR yang pernah menerima dana dan mengikuti pelatihan dari instansi selain DP3AKB. Beberapa pelaku IR yang menerima akses ke pelatihan dan dana di luar Program IR banyak yang tergabung dalam organisasi usaha, memiliki posisi di masyarakat seperti RT, PSM, atau pengurus PKK, dan juga aktif dalam mengikuti kegiatan seputar pelatihan usaha dari instansi lainnya sebelum Program IR ada.

Gambar 4 Grafik Pelaku IR Kota Pangkalpinang Mendapatkan Informasi Kegiatan Pelatihan Lainnya dari Instansi Selain DPPPAB



Sumber: Data diolah, 2021

Gambar 5 Grafik Pelaku IR Kota Pangkalpinang Mendapatkan Informasi Bantuan Modal Usaha dari Instansi Selain DPPPABK



Sumber: Data diolah, 2021

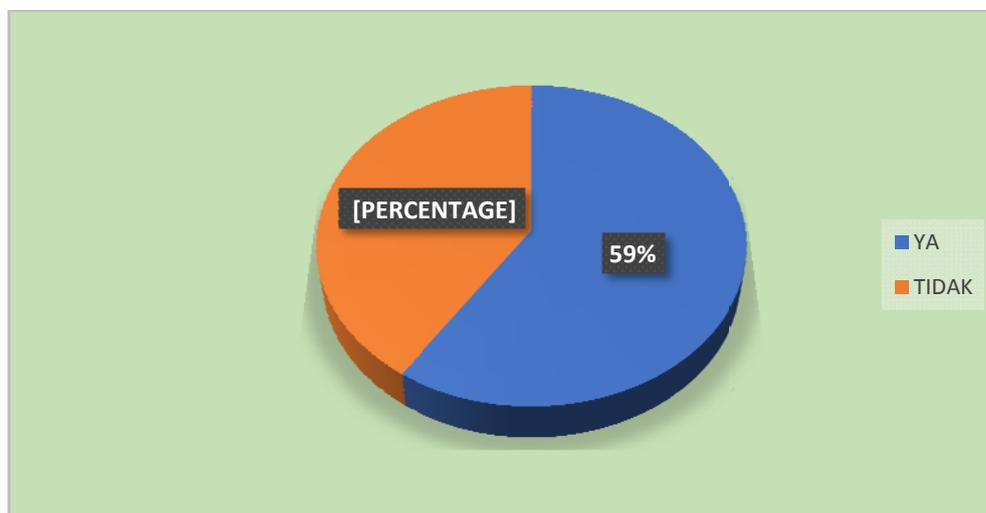
Berdasarkan data grafik 5, 69 persen pelaku IR menyatakan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi bantuan modal usaha dari instansi selain DPPPABK dan 31 persen menyatakan pernah. Hasil wawancara menunjukkan keempat orang pelaku IR menyatakan pernah mengikuti pelatihan lainnya sesudah mengikuti kegiatan pelatihan dari Program IR serta beberapa di antaranya juga pernah mendapatkan bantuan.

3. Penyesaran

Upaya penyesaran mengenai kesetaraan gender tidak disampaikan secara langsung lewat materi, melainkan hanya pengantar sebelum acara pelatihan. Upaya penyesaran lainnya dilakukan melalui materi pelatihan komputer, pengetahuan mengenai komputer bagi usaha membuat para pelaku IR menyadari untuk lebih banyak mengeksplor pengetahuan, baik dalam pelatihan maupun di luar pelatihan. Hasil angket juga menggambarkan bahwa 100 persen atau seluruh pelaku IR menyadari bahwa pentingnya keterampilan usaha bagi perempuan dari pelatihan Program IR. Hal ini membuat mereka sadar bahwa pengetahuan tersebut dapat meningkatkan kualitas diri mereka dan dapat diimplementasikan dalam usaha yang digeluti. Pengetahuan yang diperoleh mengenai pengoperasian komputer hingga pengelolaan keuangan dan pemasaran melalui internet.

Mengenai materi penyesaran gender, 59 persen pelaku IR menyatakan pernah mendapatkan materi mengenai kesetaraan dan keadilan gender dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Program IR, sedangkan 41 persen menyatakan tidak pernah mendapatkan materi tersebut.

Gambar 6 Grafik Pelaku IR Kota Pangkalpinang Mendapatkan Materi Kesetaraan dan Keadilan Gender di Kegiatan Pelatihan Program IR



Sumber: Data diolah, 2021

Kesadaran para pelaku IR mengenai hak-hak mereka sebagai perempuan dalam pembangunan terwujudkan dalam tindakan beberapa pelaku IR yang aktif mengajak perempuan lain di sekitarnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan. Beberapa pelaku IR juga membantu kerja satgas atau PSM dalam menangani kekerasan terhadap perempuan maupun kegiatan pemberdayaan bagi perempuan dan menjadi bagian dari PSM yang menjadi perwakilan di Puspa (forum pemberdayaan perempuan).

Aspek penyadaran juga termanifestasikan dalam tindakan beberapa pelaku IR yang membagikan ilmunya selama pelatihan ke perempuan di sekitar lingkungannya serta memperkerjakan mereka sebagai karyawan dalam usahanya. Beberapa pelaku IR juga sering menanyakan kegiatan terkait usaha yang akan diselenggarakan oleh DP3AKB Kota Pangkalpinang atau kegiatan lainnya. Hal tersebut menandakan bahwa timbulnya kesadaran dari para pelaku IR untuk mengasah keterampilan diri.

4. Partisipasi

Program IR memberikan stimulus ke dalam diri mereka untuk mengasah keterampilannya dengan mengikuti kegiatan pelatihan lainnya yang mana sebesar 94 persen pelaku IR mengatakan hal tersebut, namun di sisi lain hanya 22 persen pelaku IR yang merasa terdorong untuk aktif mengikuti kegiatan IR lainnya setelah kegiatan pelatihan berlangsung. Hal tersebut disebabkan karena belum ada kegiatan lain yang diinformasikan kepada mereka setelah mengikuti pelatihan, hanya beberapa pelaku IR yang mengikuti kegiatan lain dari DP3AKB Kota Pangkalpinang seperti bazar setelah pelatihan ICT.

Hasil angket lainnya menunjukkan sebesar 41 persen pelaku IR aktif berpartisipasi dalam kegiatan maupun organisasi setelah mengikuti Program IR. Pelaku IR yang memegang posisi seperti pemimpin masyarakat atau PSM di daerah tempat tinggalnya yang biasanya aktif dalam kegiatan dan organisasi masyarakat, selebihnya jarang bahkan tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan setelah itu.

Program IR tidak terlalu berkontribusi terhadap keaktifan para pelaku IR menyampaikan sarannya di setiap kegiatan yang diikuti, hanya 28 persen yang aktif dalam menyampaikan sarannya di kegiatan pelatihan Program IR. Berdasarkan keaktifan dalam menyampaikan saran di kegiatan atau organisasi masyarakat, hanya 34 persen yang mengaku aktif. Beberapa pelaku IR yang tergolong aktif menyampaikan sarannya dalam kegiatan publik biasanya menjadi perwakilan organisasinya dalam forum publik atau menjadi perangkat RT RW atau memegang posisi di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh status kepemimpinan mereka di masyarakat sehingga mereka memiliki otoritas dan keberanian dalam menyampaikan aspirasinya.

5. Kontrol

Pada aspek pengambilan keputusan di lingkup keluarga diketahui sebesar 94 persen pelaku IR ikut dalam mengambil keputusan dalam kehidupan berkeluarga. Selain itu, 100 persen atau seluruh pelaku IR mengaku mempunyai kontrol dalam menggunakan penghasilannya. Artinya hampir seluruh pelaku IR memiliki kontrol atas keputusan di kehidupan keluarga dan penghasilannya.

Pada aspek kepemimpinan publik, data statistik menunjukkan bahwa hanya 25 persen pelaku IR yang pernah menjadi pemimpin dalam organisasi dan kegiatan masyarakat. Kemudian, sebesar 41 persen Pelaku IR aktif dalam merencanakan kegiatan atau strategi dalam organisasi yang diikuti. Pada rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah, 25 persen pelaku IR menjawab bahwa pendapatnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di rapat tersebut. Tidak seluruh Pelaku IR turut andil dalam pengambilan keputusan di masyarakat, hanya pelaku IR yang memiliki jabatan di masyarakat yang pendapatnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Mayoritas pelaku IR hanya fokus pada usahanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis diperoleh kesimpulan bahwa Program Industri Rumahan (IR) di Kota Pangkalpinang belum dapat memenuhi kelima aspek dari analisis gender model Longwe secara optimal. Level yang sudah tercapai adalah kesejahteraan dan kesadaran. Program IR belum pernah memberikan manfaat kesejahteraan secara materiil kepada para perempuan pelaku IR melalui bantuan dana maupun fasilitas usaha,

namun pelatihan ICT dari Program IR memberikan kontribusi kesejahteraan kepada sebagian besar pelaku IR melalui pengetahuan mengenai komputer dan teknologi dapat membantu pelaku IR dalam menjalankan usahanya, seperti pembukuan usaha, pembelian bahan baku, dan memasarkan produk menggunakan teknologi. Peneliti menyarankan dalam keterbatasan akses yang dialami banyak pelaku IR dalam menjangkau pasar serta konsumen yang lebih luas, bantuan, dan pelatihan selain dari Program IR, diperlukan kerja sama dan koordinasi berkelanjutan dengan OPD yang berkaitan dengan UMKM dan perdagangan, PSM, petugas kecamatan, petugas kelurahan, maupun RT dan RW untuk menjangkau serta merangkul pelaku IR yang belum memiliki akses ke pasar maupun konsumen yang lebih luas dengan mempromosikan usaha mereka melalui bazar ataupun media sosial dan *marketplace* sebagai alternatif di kala masa pandemi. Pelaku IR yang kekurangan akses tersebut juga harus dilibatkan ke dalam kegiatan pelatihan di luar Program IR agar mendapatkan banyak pengetahuan serta koneksi yang dapat memberdayakan mereka dan meningkatkan usahanya ke tingkat selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ahada. (2020). *Alfamart, Indomaret dan MM Acing di Pangkalpinang Dibatasi, Simak Penjelasan Disperindagkop*. Babel Review. <https://babelreview.co.id/alfamart-indomaret-dan-mm-acing-di-pangkalpinang-dibatasi-simak-penjelasan-disperindagkop>
- Anggita, W., Wibawa, D. P., & Yanuar, D. (2018). Industri Rumah Tangga sebagai Usaha Pemberdayaan Perempuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Ketahanan Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 5(1), 18–23. <http://journal.ubb.ac.id/index.php/lppm/article/view/677>
- Beckman, P. R., & D'Amico, F. (1994). *Women, Gender, and World Politics (Perspectives, Policies, and Prospects)*. Greenwood Publishing Group.
- BPS. (2017). *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017*. <http://bps.go.id>
- BPS. (2018). *Persentase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional, Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2017-2018*. <https://www.bps.go.id/indicator/23/1538/2/persentase-penduduk-yang-hidup-di-bawah-garis-kemiskinan-nasional-menurut-jenis-kelamin.html>
- Kamaluddin, M. (2019). Program Pendampingan Perempuan Bagi Pegiat Industri Rumahan. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 12(02), 29–35. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v12i02.570>
- KPPPA RI. (2016). *Press Release: Menteri PP dan PA “Three Ends Strategi Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak”*. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/910/press-release-menteri-pp-dan-pa-three-ends-strategi-mengakhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>

-
- KPPPA RI. (2019a). *Industri Rumahan, Tingkatkan Ekonomi Perempuan dan Perkuat Ketahanan Keluarga*. KPPPA RI. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2412/industri-rumahan-tingkatkan-ekonomi-perempuan-dan-perkuat-ketahanan-keluarga>
- KPPPA RI. (2019b). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*.
- KPPPA RI. (2020). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Medeiros, M., & Costa, J. (2010). The 'feminisation of poverty': a widespread phenomenon? In *The International Handbook of Gender and Poverty: Concepts, Research, Policy* (pp. 95–100). Edward Elgar Publishing Limited, Edward Elgar Publishing, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. In *SAGE Publication, Inc.* (Vol. 112, Issue 483). file:///C:/Users/youhe/Downloads/kdoc_o_00042_01.pdf
- Mutiara, P. D. (2017). Responsivitas Gender dalam Proses Pemberdayaan Oleh Yayasan Annisa Swasti (Studi Pada Sekolah Kepemimpinan Buruh Gendong Pasar Beringharjo). *Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 107–126.
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Penerbit Garudhawacara. <https://books.google.co.id/books?id=tDUtDQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Penerbit Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1999). Jaringan Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 14(3), 1–25.